PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI

(Studi Kasus di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)

SKRIPSI

"Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)"

Oleh:
HOERUNNI'MATI SANGADAH
NIM. 1617201104

JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hoerunni'mati Sangadah
NIM	: 1617201104
Jenjang	: S1
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 22 September 2020

METERAI TEMPEL
9CA26AHF656495083
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hoerunni'mati Sangadah
NIM. 1617201104

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI (Studi Kasus di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh Saudari **Hoerunni'mati Sangadah NIM. 1617201104** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **13 Oktober 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji

Ubaidillah, S.E., M.E.I.
NIP. 19880924 201903 1 008

Pembimbing/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Purwokerto, 26 Oktober 2020
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto
Di-
Purwokerto

Assalamu'alaikumm Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Hoerunni'mati Sangadah NIM. 1617201104 yang berjudul:

Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)
dalam Meningkatkan Ekonomi
(Studi Kasus di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 22 September 2020
Pembimbing,

Rahmini Hadi, S.E, M.S.i.
NIP.197012242005012001

MOTTO

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia."
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

"Bahwa adab adalah sesuatu yang lebih tinggi di atas ilmu".

IAIN PURWOKERTO

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
(Studi Kasus di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)

HOERUNNI'MATI SANGADAH
NIM. 1617201104

E-mail: khoirunnimahsaadah@gmail.com
Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Kesejahteraan, kebebasan dari masalah kemiskinian, kemakmuran dan kemajuan pada tingkat ekonomi masyarakat adalah cita-cita setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dalam usahanya meningkatkan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan, masyarakat juga membutuhkan pemerintah sebagai lembaga yang memfasilitasi, melindungi dan membantu memudahkan dalam memenuhi kebutuhan serta mencapai kesejahteraan. Dalam hal tersebut pemerintah Indonesia memberikan fasilitas, bantuan, dan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program yang diberikan kepada masyarakat miskin, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti bagaimana tingkat ekonomi masyarakat dengan adanya pemberdayaan ekonomi melalui Program Keluarga Harapan di Desa Karangnangka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ekonomi masyarakat dengan adanya pemberdayaan ekonomi melalui Program Keluarga Harapan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi (pengamatan), wawancara serta dokumentasi, sementara teknik analisis dengan reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik uji keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Karangnangka dari adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dilihat berdasarkan beberapa aspek yang menentukan keadaan atau tingkat ekonomi masyarakat, yaitu tingkat pendidikan, pendapatan, jenis tempat tinggal serta fasilitas kekayaan.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Tingkat Ekonomi Masyarakat, Program Keluarga Harapan (PKH).*

COMMUNITY EMPOWERMENT
THROUGH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
TO INCREASE THE ECONOMY
(Case Study at Karangnangka Village, Kedungbanteng District, Banyumas Regency)

HOERUNNI'MATI SANGADAH
NIM. 1617201104

E-mail: Khoirunnimahsaadah@gmail.com
Department of Sharia Economics, Faculty of Economics and Islamic Business
Islamic State Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Prosperity, freedom from the problems of poverty, prosperity and progress at the economic level of society are the ideals of every nation, including Indonesia. In this processto increase the economy and create prosperity, the community also needs the government as an institution who facilitat, protect and help make it easier to sufficient needed and achieve the prosperity. In this case Indonesian government provides facilities, assistance, and forms of civil economic empowerment through programs provided to the poor, namely the Program Keluarga Harapan (PKH). The author is interested in knowing and studying the economic level of the community with the existence of economic empowerment through the Program Keluarga Harapan in Karangnangka Village. The purpose of this research is to see the economic level of the community with the existence of economic empowerment through the Program Keluarga Harapan.

This research uses qualitative research methods with a descriptive approach and field research. Research data collected through observation, interview and documentation, than analyzed by data reduction, data display and withdrawal. The validity test technique used in this study is the triangulation technique.

The results showed that the economic level of the community or Keluarga Penerima Manfaat (KPM) in Karangnangka Village through the Program Keluarga Harapan (PKH) had increased. This increase is seen on several aspects that determine level of the economy of the community, such as education, income, type of residence and wealth facilities.

***Keywords**: Community Empowerment, Economic Community Level, Program Keluarga Harapan (PKH).*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	ṡa	ṡa	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẑal	ẑ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

IAIN PURWOKERTO

غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	*muta’addidah*
عدة	ditulis	*‘iddah*

Ta’ Marbuṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h

حكمة	ditulis	*ḫikmah*
جزية	ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā’*

2. Bila *ta’ marbuṭah* hidup atau dengan harakat, *fatḫah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	*zakāt al-fiṭr*

Vokal Pendek

َ	*fatḫah*	Ditulis	A
ِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ُ	*ḍammah*	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	*fatḫah* + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	*jāhiliyyah*
2.	*fatḫah* + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	*tansā*
3.	*kasrah* + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	*karīm*
4.	*ḍammah* + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	*furūḍ*

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
تن شكر تم	Ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah.*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	*zawī al-furūḍ*
اهل السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Achmad Mubasyir dan Ibu Alfiatun Jannah, yang selalu mencurahkan seluruh perhatian, cinta dan kasih sayang, semangat dan motivasi, pengorbanan yang tak dapat tergantikan oleh apapun, serta doa terbaik yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan ibu dengan Rahmat-Nya dan selalu diberikan kebahagiaan serta senantiasa dilindungi dan diberi kesehatan serta umur panjang.
2. Adik tercinta, Ahmad Mujab Assaefi yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa. Semoga kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, berguna bagi orang tua, agama, bangsa dan negara.
3. Segenap keluarga besar Eyang Sarwani dan Eyang Solechan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, harapan, motivasi dan semangat, serta do'a yang tiada henti. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan Rahmat-Nya.
4. Abah Umi dan keluarganya, serta guru-guru dan dosen-dosen saya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat dan tak terhitung berapa banyak barakah dan doanya.
5. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah C angkatan 2016, yang selalu membersamai di bangku perkuliahan.
6. Sahabat Javanesse. Iggeenurzanah, Dyah Dwi Kartikaningrum, Laelatul Hikmah, Nabila Ayu Khairunnisa, Uci Oktaviani, Avita Margi Royani, Nabila Al Khonsa, Triskia Ayu Nabila, Aristia Eka Mukti Lestari, yang selalu membersamai dan memberi warna dalam setiap langkah perjalanan kuliah.
7. Sahabat sejak zaman "kerudung paris" Anis Sulfuadah, Naela Zahro, Dheka Hesty Arline, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do'a dari kejauhan.
8. Semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan semangat serta do'a baiknya untuk saya dalam menyelasikan skripsi ini

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada kita. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak semoga kita menjadi ummat yang mendapatkan syafa'at Nabi SAW di hari Akhir.

Bersamaan dengan selesainnya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M. Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dewi Laela Hiyatin, S.E., M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Rahmini Hadi, SE., M.S.i, sebagai dosen pembimbing skripsi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, do'a, serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa Allah selalu memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Ibu.
8. Segenap Dosen, Staff Karyawan Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, khususnya dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam. Yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan dan membantu dalam proses perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

9. Pendamping PKH Desa Karangnangka, Ibu Leni. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk membantu penulis dalam proses penelitian ini.
10. Segenap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Desa Karangnangka yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
11. Keluarga, saudara, teman dan sahabat yang telah memberikan do'a, dorongan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat Javanesse, khususnya Iggeenurzanah yang selalu membersamai setiap langkah perjalanan kuliah sampai pada proses penyelesaian skripsi ini. Semoga tali silaturrahim selalu terjaga.
13. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah C 2016 yang bersama-sama saling memberikan pengalaman dan pelajaran berharga. Semoga silaturrahmi selalu terjaga, dan kita semua menjadi pribadi yang selalu bahagia serta sukses dunia dan akhirat.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik serta saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 22 September 2020

Hoerunni'mati Sangadah
NIM. 1617201104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **xii**
KATA PENGANTAR ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 7
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
E. Kajian Pustaka 10
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 15
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 15
2. Hakekat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 17
3. Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 18
4. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 20
B. Tingkat Ekonomi 21
1. Pengertian Tingkat Ekonomi 21

IAIN PURWOKERTO

2. Faktor-Faktor yang Menentukan Keadaan Tingkat Ekonomi 23
C. Program Keluarga Harapan 27
1. Pengertian Program Keluarga Harapan 27
2. Kriteria Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan..... 29
3. Tujuan Program Keluarga Harapan 30
4. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan 31
5. Mekanisme Penyaluran Program Keluarga Harapan..... 32
6. Hak dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan 32
7. Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 34
8. Sanksi-Sanksi 35
D. Landasan Teologis 36
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 39
B. Subjek dan Objek Penelitian 39
C. Sumber Data 40
D. Teknik Pengumpulan Data 40
E. Teknik Analisis Data 42
F. Teknik Uji Keabsahan Data..... 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Desa Karangnangka 45
1. Kondisi Geografis Desa Karangnangka 45
2. Kondisi Demografis Desa Karangnangka 45
B. Program Keluarga Harapan Di Desa Karangnangka 47
1. Sejarah Program Keluarga Harapan Di Desa Karangnangka 47
2. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Karangnangka 48
C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Program Keluarga Harapan 49

IAIN PURWOKERTO

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan 50
2. Tingkat Ekonomi Masyarakat Dengan Adanya Program Keluarga Harapan 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Karangnangka 5
Tabel 1.2 Hasil Penelitian yang Relevan 12
Tabel 2.1 Nilai Manfaat Tahunan Program Keluarga Harapan 35
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 46
Tabel 4.2 Daftar Pengurus KUBE "Maju Bersama" Desa Karangnangka 51
Tabel 4.3 Perubahan Pendapatan KPM PKH Desa Karangnangka per bulan 61

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Usaha Warung Milik KPM PKH Desa Karangnangka..... 52
Gambar 1.2 Kerajinan Hasil Pelatihan KPM PKH yang Sudah Dipasarkan 54

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3 Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran 4 Surat Izin Observasi
Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran 6 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
Lampiran 7 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran 8 Surat Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 10 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
Lampiran 11 Surat Bimbingan Skripsi
Lampiran 12 Blanko/Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 14 Berita Acara Sidang Munaqosyah
Lampiran 15 Sertifikat OPAK IAIN Purwokerto
Lampiran 16 Sertifikat Bahasa Arab
Lampiran 17 Sertifikat Bahasa Inggris
Lampiran 18 Sertifikat BTA PPI
Lampiran 19 Sertifikat Aplikom
Lampiran 20 Sertifikat PPL
Lampiran 21 Sertifikat PBM
Lampiran 22 Sertifikat KKN

IAIN PURWOKERTO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah

Permasalahan yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah kesejahteraan warga negaranya. Kesejahteraan telah menjadi bagian penting dari sebuah negara. Berbagai cara, metode, aturan, alat, pendekatan, ataupun kebijakan telah dipilih dan dilakukan oleh sebuah negara dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut (Purwana, 2014: Vol. 11). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara merupakan salah satu tujuan atau cita-cita setiap bangsa. Setiap bangsa menginginkan terciptanya masyarakat yang bebas dari kemiskinan, masyarakat yang makmur dan masyarakat yang tingkat perekonomiannya semakin maju, sehingga kesejahteraan akan tercipta.

Menurut Dampriyanto dalam jurnal yang ditulis oleh Purwana (2014), Indonesia adalah termasuk diantara negara yang menjadikan kesejahteraan bangsanya sebagai tujuannya. Rumusan kesejahteraan dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, komitmen tersebut juga terjabarkan dalam batang tubuh UUD 1945, yakni Bab XIV pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial (Purwana, 2014: Vol. 11).

Kesejahteraan juga merupakan tujuan dari ajaran agama Islam dalam bidang ekonomi. Sebagaimana Allah telah menjelaskan mengenai kesejahteraan dalam ayat-ayat Al-Qur’an, seperti dalam Qur’an Surat Al-Jatsiyah ayat 13:

وَسَخَّرَلَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الأَرْضِ جَمِيْعًا
مِنْهُ، اِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ.

Artinya: dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan di bumi semuanya (sebagai Rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kamu yang berfikir.

Dalam ayat tersebut dijelaskna bahwa Allah telah memberikan segala apa yang ada di langit dan bumi sebagai nikmat untuk umat manusia dan sebagai sarana bagi manusia untuk mendapatkan kesejahteraan dari apa yang Allah sediakan di muka bumi ini. Dari segala yang ada di langit dan di bumi tersebut, manusia dituntut untuk berfikir dan berupaya untuk memanfaatkannya sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada sehingga kesejahteraan akan tercapai pada diri manusia.

Allah juga menuntun manusia agar terus bekerja keras sehingga tidak meninggalkan keturunan yang lemah, yang mengalami keterbelakangan sosial dan ekonomi serta tingkat kesejahteraan yang rendah. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 9:

وَالْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْتَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيْدًا

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Dari firman Allah di atas, jelas bahwa Allah dengan tegas memerintahkan umat manusia untuk selalu berusaha dan memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini dengan baik dan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada serta untuk hal-hal baik. Usaha tersebut guna memperbaiki serta meningkatkan tingkat ekonomi manusia sebagai masyarakat yang berada dalam sebuah negara dan bangsa. Sehingga ketika tingkat ekonomi masyarakat baik, maka kesejahteraan juga akan tercipta. Dengan harapan kesejahteraan tersebut selalu tercipta pada setiap generasi yang ada, karena dengan demikian berarti cita-cita sebuah bangsa dan negara telah tercapai.

Dalam usaha meningkatkan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan, masyarakat juga membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang

memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dalam istilah modern lembaga tersebut dikenal dengan “Pemerintah” (Sodiq, 2015: Vol. 3). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia juga telah menyediakan pelayanan-pelayanan sosial untuk masyarakat sebagai fasilitas untuk membantu mencapai sebuah kesejahteraan melalui upaya-upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

Sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas dan layanan dalam upaya menciptakan kesejahteraan serta meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah memberikan beberapa bantuan melalui program-program yang diberikan kepada masyarakat miskin di Indonesia. Beberapa program bantuan tersebut antara lain: bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutihula), Bantuan Pangan Non Tunai (BTPN), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satu dari beberapa program tersebut, pemerintah Indonesia menggulirkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program ini merupakan program yang memberikan bantuan secara bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM). Persyaratan tersebut terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu mengenai kesehatan dan pendidikan, dengan harapan melalui program ini pemerintah dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia (Kemensos.go.id: 2019).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan pemerintah yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan di kemudian hari pada tingkat ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pasalnya, program tersebut pada tahun 2018 telah berkontribusi dalam menunrunkan angka kemiskinan menjadi 9,82% (beritasatu.com). Selain itu, PKH memiliki beberapa capaian yang sifatnya membangun dan berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat. Diantara capaian yang ada pada Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain: memberikan jaminan sekolah,

jaminan kesehatan ibu hamil dan bayi, pemberian edukasi tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, serta pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat miskin untuk lebih mandiri dan peduli terhadap tingkat kehidupan dan kesejahteraan di masa yang akan datang.

Program Keluarga Harapan dalam FDS (*Family Defelopment Session*) atau pembinaan terhadap Keluarga Penerima Manfaat, yang dilakukan setiap bulan dan wajib diikuti oleh setiap KPM dibawah binaan Pendamping PKH juga terdapat edukasi bidang ekonomi. Di mana, dalam pembinaan di bidang ekonomi tersebut KPM diberikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, cermat meminjam dan menabung, serta pengetahuan tentang berwirausaha. Selain itu, pemerintah melalui PKH juga menyediakan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) sebagai wadah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan cara berwirausaha, yang mana tujuannya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga dalam kebijakan Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan pemerintah dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat miskin, yang nantinya juga akan berpengaruh pada kualitas hidup dan tingkat angka kemiskinan di Indonesia (Wawancara dengan Andi, 2020).

IAIN PURWOKERTO

Di Kabupaten Banyumas terdapat 27 kecamatan dengan 331 desa/kelurahan yang memperoleh bantuan melalui Program Keluarga Harapan, salah satunya adalah Desa Karangnangka di Kecamatan Kedungbanteng. Masyarakat miskin di Desa Karangnangka yang tergolong dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM), telah menjadi peserta Program Keluarga Harapan sejak tahun 2013.

Berikut data jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) desa Karangnangka:

Tabel 1.1
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Desa Karangnangka

No	Tahun Penerimaan	Jumlah Peserta
1	2013	78
2	2014	76
3	2015	76
4	2016	156
5	2017	159
6	2018	216
7	2019	196
8	2020	196

Sumber*: Data Sekunder yang Diolah*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah KPM dari tahun 2013 ke tahun 2014 hanya mengalami penurunan sebanyak 2 KPM dan pada tahun 2015 jumlah KPM masih sama dengan tahun 2014. Kemudian dari tahun 2016 sampai tahun 2018 jumlah KPM meningkat secara terus menerus, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan jumlah KPM secara keseluruhan di Indonesia oleh pihak pemerintah. Dan pada tahun 2019 hanya mengalami sedikit penurunan jumlah KPM, hingga tahun 2020 jumlah KPM masih sama dengan tahun 2019.

Desa Karangnangka merupakan salah satu desa dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang masih tergolong rendah dalam hal peningkatan ekonomi melalui wirausaha. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pendamping PKH Desa Karangnangka, sebagian dari KPM masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya memiliki usaha dan pentingnya meningkatkan kemampuan dalam berwirausaha. Mereka lebih memilih menjadi ibu rumah tangga biasa yang penghasilannya hanya dari

suami mereka dan ada juga yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), bahkan ada yang menjadi buruh cuci dan setrika. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang ada pada KPM Desa Karangnangka yang harus diperbaiki. Sebab peningkatan kemampuan berwirausaha dan peningkatan pendapatan dari hasil usaha adalah salah satu yang menjadi indikator keberhasilan PKH. Selain itu, Desa Karangnangka sendiri merupakan desa dengan potensi pendapatan masyarakat yang tinggi, karena di desa tersebut terdapat beberapa lokawisata dan industri yang memiliki ratusan karyawan. Sehingga apabila hal tersebut benar-benar dimanfaat oleh KPM untuk berwirausaha dan memanfaatkan apa yang sudah diperoleh dari pemberdayaan yang ada dalam PKH, maka akan dapat mengubah pola pikir serta meningkatkan perekonomian mereka.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada pendamping PKH Desa Karangnangka terkait partisipasi peserta PKH dalam kegiatan yang ada di KUBE “Maju Bersama” dan perubahan tingkat pendapatan peserta PKH, Leni sebagai pendamping menjelaskan bahwa tingkat partisipasi peserta PKH Desa Karangnangka dalam KUBE “Maju Bersama” masih cukup rendah. Harapannya sebagai pendamping adalah keaktifan semua peserta dalam KUBE. Akan tetapi karena adanya kesibukan dari masing-masing angota serta kurangnya minat dan kesadaran akan pentingnya berwirausaha, menjadi sebab kurangnya keaktifan dari peserta PKH. Anggota KUBE Maju Bersama saat ini ada 14 anggota yang terdiri dari perwakilan anggota tiap kelompok, di mana terdapat 7 (tujuh) kelompok di Desa Karangnangka. Dan sebagai pendamping, dia berharap peserta PKH yang aktif dalam meningkatkan kemampuan wirausaha sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat akan semakin bertambah, mengingat pentingnya ketrampilan berwirausaha.

Kaitannya dengan pendapatan, rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh peserta PKH dari sebelum menjadi peserta sampai setelah menjadi peserta PKH bervariasi. Beberapa peserta ada yang pendapatannya semakin membaik, diantara mereka yang sebelum menjadi peserta PKH pendapatannya antara Rp. 800.000,00 sampai Rp. 1.200.000,00. Kemudian setelah menjadi

peserta PKH pendapatan mereka mengalami kenaikan antara Rp. 1.000.000,00 hingga Rp. 2.000.000,00, hal tersebut juga dikarenakan mereka menerapkan ilmu yang telah didapat dari pertemuan pembinaan, memanfaatkan bantuan yang diperoleh, serta memulai berwirausaha dan mengembangkan usaha mereka. Tetapi tidak sedikit pula peserta PKH yang sejak sebelum hingga setelah menjadi peserta PKH pendapatannya masih tergolong tetap, pendapatan mereka juga bervariasi antara Rp.800.000,00 sampai Rp. 1.500.000,00. Akan tetapi walaupun mereka yang pendapatannya masih tetap, mereka sudah mulai memperbaiki kelayakan hidup. Diantara sebagaian besar dari mereka mulai memperbaiki kelayakan tempat tinggal dan fasilitas yang menunjang kelayakan hidup mereka. Oleh karena melihat perubahan pendapatan beberapa peserta yang semakin membaik dan tidak sedikit pula yang belum mengalami perubahan pendapatan, Leni sebagai pendamping berharap agar mereka yang belum mulai berwirausaha akan menyadari pentingnya berwirausaha dan lebih memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Harapannya dengan berwirausaha, akan menambah jumlah pendapatan dan peningkatan kesejahteraan mereka (Hasil wawancara dengan Leni, 2020).

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilalukan pemerintah melalui Program Keuarga Harapan (PKH) dan peluang yang ada di Desa Karangnangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, diharapkan akan dapat berdampak positif bagi KPM sebagai bagian dari masyarakat Desa Karangnangka. Adanya pemberdayaan dan peuang tersebut diharapkan dapat mengubah pola pikir serta dapat meningkatkan perekonomian KPM PKH Desa Karangnangka.

Berdasarkan latar belakang dan hasil wawancara di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemberdayaam ekonomi masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan mereka melalui Program Keluarga Harapan (PKH), dengan penelitian yang berjudul **"Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan**

Perekonomian (Studi Kasus Di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas)”.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dari judul penelitian ini, berikut disajikan definisi operasional istilah-istilah yang menjadi kata kunci dari penelitian ini, yaitu:

1. Pemberdayaan Masyarakat

   Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Mubyarto, 2000: 263).

   Pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian masyarakat (Bashith, 2012: 27).

2. Ekonomi Masyarakat

   Dalam konteks permasalahan sederhana, ekonomi rakyat merupakan strategi “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh penduduk masyarakat miskin, baik dikota maupun desa (Mubyarto, 1996: 4). Meningkatkan kesejahteraan, ekonomi merupakan kegiatan dalam pemberdayaan di masyarakat. Ekonomi dapat diartikan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan uatama yaitu: produksi, distribusi, dan konsumsi.Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan (Sumodiningrat, 1998: 24).

IAIN PURWOKERTO

3. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuansosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (pkh.kemsos, 2018). PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat (TNP2K, 2017: 1).

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: "Bagaimana tingkat ekonomi masyarakat dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Keluarga Harapan?"

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya bagi masyarakat yang menerima manfaat PKH.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang program pemerintah di bidang ekonomi dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

IAIN PURWOKERTO

c. Bagi Pengayaan Bidang Ilmu

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan bagi yang membutuhkan sehingga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang ekonomi dan program pemerintah yang kaitannya dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, serta dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian yang membahas teori-teori serta mengkaji penelitian-penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, pengkajian terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dimaksudkan sebagai bahan acuan dan berguna untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Zamzami dalam jurnal MIMBAR Vol. XXVII No. 1 yang berjudul "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Nagari Ampiang Perak, Sumatra Barat" tahun 2011. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) merupakan program yang diciptakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kehidupan penduduk di kawasan pesisir Sumatera Barat. Program tersebut dilakukan karena terdapat beberapa permasalahan, antara lain permasalahan kultural, seperti kemalasan, gaya hidup yang tidak produktif, tidak efisien, rendahnya tingkat pendidikan, ketergantungan pada temgkulak, serta rendahnya kompetensi penguasaan teknologi mesin-mesin perikanan. Dari hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa program PEMP yang dilaksanakan oleh pemerintah belum optimal dalam pelaksanaannya. Di satu sisi, nelayan buruh cukup terbantu dengan pinjaman mesin dan dana bergulir, tapi sisi lainnya, pelaksanaannya masih ditemui kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut berasal dari masyarakat sendiri dan pemerintah (Zamzami, 2011).

Penelitian dalam jurnal Sosiohumaniora Vol. 6 No. 3 tahun 2004, yang dilakukan oleh Almasdi Syahza dengan judul "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau", di mana dalam penelitian tersebut, penulis menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar sebesar 1,72%, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah (Syahza, 2004).

Penelitian oleh Munawarah Sahib dalam tesisnya yang berjudul "Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa" pada tahun 2016, menyatakan bahwa kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bajeng berjalan dengan sangat baik, sehingga dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Selain dipengaruhi oleh kebijakan Program Keluarga Harapan, penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti: program pemberian modal usaha untuk rakyat kecil, bantuan kesehatan gratis seperti Jamkesmas/BPJS, dan lain-lain (Sahib, 2016).

Hasil penelitian Dyah Ayu Virgoreta dkk, dalam jurnal yang berjudul "Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus di Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tegal). Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa implementasi PKH di Desa Beji telah berhasil, dilihat dari pemanfaatan pelayanan kesehatan dan pendidikan oleh masyarakat yang tergolong peserta PKH, sehingga taraf kesehatan dan pendidikan masyarakat Desa Beji meningkat. Serta keberhasilan implementasi PKH menurut peneliti, dilihat berdasarkan data yang diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah peserta PKH di Desa Beji terus menurun. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya bantuan PKH akan

mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tegal (Virgoreta, 2015).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Khodiziah Isnaini Kholif dkk, pada tahun 2014 dengan judul, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto". Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai. Masih adanya pelanggaran pendamping PKH, pendamping pelaksanaan PKH tidak berhasil memberikan arahan maupun bimbingan kepada masyarakat untuk berusaha menjadi masyarakat untuk berusaha menjadi lebih mandiri tanpa adanya ketergantungan terhadap bantuan-bantuan dari pemerintah. Serta tujuan dari pelaksanaan PKH belum mendapatkan hasil maksimal, masih adanya kemiskinan, gizi buruk dan ibu meninggal karena melahirkan, serta masih rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan (Kholif, 2014).

Tabel 1.2
Hasil Penelitian yang Relevan

Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
Peneliti: Lucky Zamzami **Judul Penelitian:** Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Nagari Ampiang Perak, Sumatra Barat	**Persamaan:** Sama-sama membahas tentang perberdayaan ekonomi masyarakat, jenis penelitiannya. **Perbedaan:** Lokasi penelitian, dan objek penelitiannya	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa program PEMP yang dilaksanakan oleh pemerintah belum optimal dalam pelaksanaannya. Di satu sisi, nelayan buruh cukup terbantu dengan pinjaman mesin dan dana bergulir, tapi sisi lainnya, pelaksanaannya masih ditemui kendala-kendala.
Peneliti: Almasdi Syahza **Judul Penelitian:** Pemberdayaan	**Persaman:** Sama-sama membahas dan meneliti tentang pemberdayaan ekonomi.	Penelian tersebut menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit

Ekonomi Masyarakat Perdesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau	**Perbedaan:** Jenis penelitian, objek penelitian dan lokasi penelitian.	memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya.
Peneliti: Munawarah Sahib **Judul Penelitian:** Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa	**Persamaan:** Sama-sama meneliti tentang PKH **Perbedaan:** Metodologi penelitian, lokasi penelitian, dan pada penelitian tersebut meneliti kebijakan PKH dan secara umum membahasan tentang kemiskinan. Sedangkan penelitiian ini membahas bagaimana tingkat ekonomi masyarakat dengan adanya pemberdayaan melalui PKH	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bajeng berjalan dengan sangat baik, sehingga dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan
Peneliti: Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo **Judul Penelitian:** Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten	**Persamaan:** sama-sama meneliti Program Keluarga Harapan, dan menggunakan metode kualitatif deskriptif **Perbedaan:** Tempat penelitian dan fokus penelitian tersebut adalah tentang kesejahteraan, sedangkan penelitiaan ini membahsa tentang	Memperlihatkan bahwa implementasi PKH di Desa Beji telah berhasil, dilihat berdasarkan data yang diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah peserta PKH di Desa Beji terus menurun. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya bantuan PKH akan mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Beji.

Tuban)	tingkat ekonomi.	
Peneliti: Khodiziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, dan Siswidianto **Judul Penelitian:** Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto	**Persamaan:** Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriotif, dan sama-sama meneliti PKH. **Perbedaan:** Lokasi penelitian dan fokus penelitiaan tersebut pada penanggulangan kemiskinan, sedangkan penelitaan ini membahas tentang bagaimana tingkat ekonomi masyarakatnya dengan adanya pemberdayaan melalui PKH.	Hasil penelitiaanya ini menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong belum berhasil dan belum menunjukkan hasil yang maksimal karena semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan baik dan sesuai.

Sumber*: Data Sekunder yang Diolah*

IAIN PURWOKERTO

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Mubyarto, pemberdayaan secara bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Mubyarto, 2000: 263).

Dalam Bahri (2019) disebutkan bahwa pengertian pemberdayaan masyarakat terus mengalami perkembangan. Bahkan beberapa ahli mengemukakakn definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. *Pertama,* dari aspek tujuan. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. *Kedua,* dari aspek proses. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi, terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. *Ketiga,* pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Dan *keempat*¸dari aspek cara-cara pemberdayaan. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi, dan komunitas yang diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Bahri, 2019: 11).

Dalam bukunya Efri Syamsul Bahri, Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat, tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal.

Chamber juga mengatakan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk mengangka harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial. Upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi:

a. Penyadaran tentang dan peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasikan persoalan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh golongan itu.
b. Penyadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri.
c. Meningkatkan kemampuan menejemen sumber daya yang telah ditemukenali (Rahardjo, 1999: 354).

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap permintaan (Cholitin dan Thamrin, 1997: 238). Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need)* yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan (Sumadiningrat, 1999: 66).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk mengubah pola pikir serta meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, guna

memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

2. Hakekat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Payne (1997) dalam (Bahri, 2019: 13) mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) pada hakikatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan kekuatan (daya) untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Pemberdayaan dilakukan dengan jalan meningkatkan kapasitas, pengembangan rasa percaya diri untuk menggunakan kekuatan dan mentransfer kekuatan dari lingkungannya. Sebagai suatu proses, pemberdayaan adalah usaha yang terjadi terus menerus sepanjang hidup manusia.

Menurut Sobirin (2009) dalam Bahri (2013), hakekat pemberdayaan adalah: *pertama,* pemberdayaan adalah proses, yaitu perubahan dari status yang rendah ke status yang tinggi. *Kedua,* pemberdayaan adalah metode, yaitu sebagi suatu pendekatan agar masyarakat berani mengungkapkan pendapatnya. *Ketiga,* pemberdayaan adalah program, yaitu sebagai tahapan-tahapan yang hasilnya terukur menuju kehidupan rakyat yang mandiri dan sejahtera. *Keempat,* pemberdayaan adalah gerakan, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. *Kelima¸* pemberdayaan adalah pemberian otoritas, yaitu menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan. Jadi pemberdayaan harus dilihat secara komprehensif dengan produk akhir masyarakat menjadi berdaya, memliki otoritas, menjadi subjek dalam pembangunan dan kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya (Bahri, 2013: 20-21).

Pemberdayaan pada hakekatnya juga merupakan dakwah dalam artian mengajak kepada yang *ma'ruf* dan *nahi munkar*. Menurut Ibnu Manzhur, *ma'ruf* ialah semua kebaikan yang dikenal oleh jiwa dimana yang membuat hati manusia menjadi tentram. Sedangkan *munkar* adalah

lawan dari *ma'ruf* yaitu kedurhakaan, perbuatan *munkar* adalah perbuatan yang mrnyuruh pada kedurhakaan. Dengan demikian, *munkar* adalah semua keburukan yang dikenal oleh jiwa manusia yang membuat hatinya tidak tentram.

Dengan demikian terwujud masyarakat yang berperadaban, *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*. Masyarakat yang di dalamnya saling tolong menolong dan berakhlakul karimah yang mengakui keberadaan Allah SWT sebagai Yang Maha Pencipta alam semesta (Bahri, 2019: 14-15).

3. Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan. Adapun upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan antara lain:

a. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta pemahaman terhadap konsep konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh meraka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh kongkrit yang terjadi dalam praktek usaha Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia

jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya (Rahardjo, 1999: 295).

b. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

c. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

d. Memberikan Bantuan Motivasi Moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum atau bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain (Sudjangi, 1997: 48).

4. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Mardikanto (2015) dalam bukunya Maryani dan Nainggolan (2019), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat:

a. Perbaikan Kelembagaan "*Better Institution*"

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya.

b. Perbaikan Usaha "*Better Business*"

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Di samping itu, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan, yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada disekitarnya.

c. Perbaikan Pendapatan "*Better Income*"

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

d. Perbaikan Lingkungan "*Better Environment"*

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padalah apabila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka tidak akan merusak lingkungan

e. Perbaikan Kehidupan "*Better Living*"

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Diantaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing

IAIN PURWOKERTO

keluarga. Dengan pendapatan yang membaik diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapakan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaikan Masyarakat *"Better Community*"

Apabila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang leboh baik pula (Maryani dan Nainggolan, 2019: 9-10).

B. Tingkat Ekonomi

1. *Pengertian* Tingkat Ekonomi

Menurut Damsar dan Indrayani (2016), ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *economy*. Sementara kata *economy* itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikonomike* yang berarti pengelolaan rumah tangga. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi sebagai pengelolaan tumah tangga adalah suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya rumah tangga yang terbatas dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing anggotanya (Damsar dan Indriyani, 2016: 9-10).

Secara teoritis, ekonomi dibedakan atas mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi menangani satuan ekonomi individual, termasuk pengambilan keputusan dalam rangka mengatasi permasalahan alokasi akibat kelangkaan sumber daya, sedangkan makroekonomi menangani isu-isu yang bersifat makro atau lebih luas, termasuk jumlah agregat ekonomi seperti laju pertumbuhan produksi nasional, suku bunga, pengangguran, dan inflasi (Arif dan Amalia, 2016: 2).

Kehidupan umat manusia memiliki beragam aspek, termasuk aspek ekonomi yang mencakup aktivitas ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut menjadi titik sentral dari semua aktivitas kehidupan manusia (Damsar dan Indrayani, 2016: 249). Aktivitas ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi ditinjau dari mikroekonomi, tampak pada cara dan alasan satuan-satuan yang terdapat di dalamnya membuat keputusan ekonomis dan berinteraksi untuk membentuk satuan yang lebih besar. Satuan-satuan ini mencakup konsumen, pekerja atau buruh, penanam modal, pemilik tanah, dan perusahaan bisnis (Arif dan Amalia, 2016: 2).

Menurut pandangan Islam kegiatan ekonomi merupakan tuntutan kehidupan, sebab Islam telah menjamin tiap orang secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِيْنَ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka Berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari Rizky nya. Dan hanya kepada-nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik moral maupun material, baik itu kebutuhan penting maupun yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya mengalami kecenderungan ke arah yang sama, Bagaimana mendapatkan pekerjaan dan menyelesaikannya. Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Keterbatasan manusia ini menyebabkan bertemunya antara kebutuhan satu dengan kebutuhan lainnya (Sudarsono, 2004).

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَارَ الْاَخِرَةِ، وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَا، وَاَحْسِن كَمَا اَحْسَنَ اللَّهُ اِلَيْكَ، وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ، اِنَّ اللَّهَ لاَيُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

2. Faktor-Faktor yang Menentukan Tingkat Ekonomi

Berdasarkan kodratNya manusia dilahirkan memiliki kedudukan yang sama dan sederajatnya, akan tetapi sesuai dengan kenyataan setiap manusia yang menjadi warga suatu masyarakat senantiasa mempunyai status atau kedudukan dan peranan. Dan keadaan tingkat ekonomi atau sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat itu sendiri berbeda-beda dan bertingkat. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi seseorang di masyarakat. Menurut Abdulsyani (1994), tingkat ekonomi atau sosial ekonomi seseorang dalam suatu masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis rumah tingal, dan kekayaan yang dimiliki. Sedangkan dalam penelitian ini akan diuraikan empat faktor yang menentukan, yaitu tingkat pendidikan, pendapatan, pemilikan kekayaan atau fasilitas dan jenis tempat tinggal.

a. Tingkat Pendidikan

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1 hal 8, pada dasarnya jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan

menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rokhani (pikir, cipta, rasa, dan hati nurani) serta jasmani (panca indera dan keterampilan- keterampilan). Soesanto (2002) dalam (Basrowi dan Juairiyah, 2010: Vol. 7) berpendapat bahwa melalui pendidikan bagi individu yang berasal dari masyarakat miskin, akan terbukalah kesempatan baru untuk menemukan suatu lapangan baru yang memberikan hasil lebih tinggi.

b. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah semua pendapatan kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya yang diwujudkan dalam bentuk uang dan barang. Berdasarkan jenisnya, Biro Pusat Statistik membedakan pendapatan menjadi dua yaitu:

1) Pendapatan berupa barang

Pendapatan berupa barang merupakan segala penghasilan yang bersifat regular dan biasa, akan tetapi tidak selalu berupa balas jasa dan diterimakan dalam bentuk barang atau jasa. Barang dan jasa yang diterima/diperoleh dinilai dengan harga pasar sekalipun tidak diimbangi ataupun disertai transaksi uang oleh yang menikmati barang dan jasa tersebut. Demikian juga penerimaan barang secara cuma-cuma, pembelian barang dan jasa dengan harta subsidi atau reduksi dari majikan merupakan pendapatan berupa barang.

IAIN PURWOKERTO

2) Pendapatan berupa uang

Berdasarkan bidang kegiatannya, pendapatan meliputi pendapatan sektor formal dan pendapatan sektor informal. Pendapatan sektor formal adalah segala penghasilan baik berupa barang atau uang yang bersifat regular dan diterimakan biasanya balas jasa atau kontrasepsi di sektor formal yang terdiri dari pendapatan berupa uang, meliputi: gaji, upah dan hasil investasi dan pendapatan berupa barang-barang meliputi: beras, pengobatan, transportasi, perumahan, maupun yang berupa rekreasi.

Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan baik berupa barang maupun uang yang diterima sebagai balas jasa atau kontraprestasi di sektor informal yang terdiri dari pendapatan dari hasil investasi, pendapatan yang diperoleh dari keuntungan sosial, dan pendapatan dari usaha sendiri, yaitu hasil bersih usaha yang dilakukan sendiri, komisi dan penjualan dari hasil kerajinan rumah.

Menurut Yudohusodo (1998) dalam Hestanto.web.id, tingkat pendapatan seseorang dapat digolongkan dalam 4 golongan yaitu:

a) Golongan yang berpenghasilan rendah (*low income group*) yaitu pendapatan rata-rata dari Rp 150.000 perbulan.
b) Golongan berpenghasilan sedang (*moderate income group*) yaitu pendapatan rata-rata Rp 150.000 - Rp 450.000 perbulan.
c) Golongan berpenghasilan menengah (midle income group) yaitu pendapatan rata-rata yang diterima Rp 450.000 – Rp 900.000 perbulan.
d) Golongan berpenghasilan tinggi (high income group) yaitu rata-rata pendapatan lebih dari Rp 900.000 (Hestanto, 2020).

c. Pemilikan Kekayaan atau Fasilitas.

Pemilikan kekayaan atau fasilitas adalah kekayaan dalam bentuk barang- barang dimana masih bermanfaat dalam menunjang kehidupan ekonominya. Fasilitas atau kekayaan itu antara lain:

IAIN PURWOKERTO

1) Barang-barang berharga

Menurut Abdulsyani (1994:128), bahwa pemilikan kekayaan yang bernilai ekonomis dalam berbagai bentuk dan ukuran seperti perhiasan, televisi, kulkas dan lain-lain dapat menunjukkan adanya pelapisan dalam masyarakat. Semakin banyak kepemilikan harta yang bernilai ekonomi dimiliki orang tua maka akan semakin luas kesempatan orang tua untuk dapat menyekolahkan anak- anaknya, dan orang tua dapat mencukupi semua fasilitas belajar anak, sehingga dapat memotivasi anak untuk berprestasi (Abdulsyani, 1994).

2) Jenis-jenis kendaraan pribadi.

Kendaraan pribadi dapat digunakan sebagai alat ukur tinggi rendahnya tingkat sosial ekonomi seseorang. Misalnya: orang yang mempunyai mobil akan merasa lebih tinggi tingkat sosial ekonominya dari pada orang yang mempunyai sepeda motor.

d. Jenis tempat tinggal.

Menurut Abdulsyani (1994:172) untuk mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dari rumahnya, dapat dilihat dari:

1) Status rumah yang ditempati, bisa rumah sendiri, rumah dinas, menyewa, menumpang pada saudara atau ikut orang lain.
2) Kondisi fisik bangunan, dapat berupa rumah permanen, kayu dan bambu. Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi, pada umumnya menempati rumah permanen, sedangkan keluarga yang keadaan sosial ekonominya menengah kebawah menggunakan semi permanen atau tidak permanen.
3) Besarnya rumah yang ditempati, semakin luas rumah yang ditempati pada umunya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya. Rumah dapat mewujudkan suatu tingkat sosial ekonomi bagi keluarga yang menempati. Apabila rumah tersebut berbeda dalam hal ukuran dan kualitas rumah. Rumah yang dengan ukuran besar, permanen dan milik pribadi dapat menunjukkan bahwa kondisi

IAIN PURWOKERTO

sosial ekonominya tinggi berbeda dengan rumah yang kecil, semi permanen dan menyewa menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya rendah (Abdulsyani, 1994).

C. Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) tidaklah sama dan bukan pula merupakan lanjutan program Program Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial penduduk miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong mata rantai kemiskinan yang terjadi selama ini (D. J. Direktorat Jaminan Sosial, 2013: 1).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap serta perilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan (Direktorat Jaminan Sosial, 2012:1).

Di bidang pendidikan, peserta PKH memiliki kewajiban terkait dengan menyekolahkan anak ke sekolah dasar, lanjutan dan menengah (SD sampai dengan SMA) termasuk anak dengan disabilitas. Selain mendaftarkan peserta didik, peserta didik yang termasuk anggota PKH tersebut harus memenuhi jumlah kehadiran yang ditetapkan dalam

program yaitu minimal 85% dari hari belajar efektif dalam sebulan, dengan demikian diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat.

Program Keluarga Harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan memberikan *income effect* kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya kelak (*insurance effect*). Secara faktual dan menurut teori yang ada, tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat rendah sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan dan bahkan berdampak pada tingginya kematian bayi (D. J. Direktorat Jaminan Sosial, 2013: 4).

Rendahnya kondisi kesehatan keluarga miskin juga berdampak pada tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama pada usia 0-5 tahun. Pada tahun 2003 misalnya, angka kematian balita pada tingkat pedapatan terendah adalah 77% per 1000 kelahiran hidup, sementara pada kelompok penduduk berpendapatan tertinggihanya 22% per 1000 kelahiran hidup. Gizi kurang berdampak buruk pada produktivitas dan daya tahan tahan tubuh seseorang sehingga menyebabkan kelompok ini teperangkap dalam siklus kesehatan yang buruk. Seringnya tidak masuk sekolah karena sakit dapat menyebankan anak putus sekolah. Kondisi kesehatan dan gizi mereka yang buruk juga menyebabkan mereka tidak dapat berprestasi di sekolah (D. J. Direktorat Jaminan Sosial, 2013: 6).

2. Kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan

Peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:

a. Memiliki ibu hamil/ibu nifas/anak balita.
b. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak
pra sekolah).
c. Memiliki anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun).
d. Memiliki anak SMP/Mts/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun).
e. Memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, termasuk anak dengan disabilitas.
f. Orang lanjut usia (D. J. Direktorat Jaminan Sosial, 2013: 19).

3. Tujuan Program Keluarga Harapan

Dalam jangka pendek dana bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. (D. J. Direktorat Jaminan Sosial 2016).

IAIN PURWOKERTO

Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Permensos No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan antara lain:

a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Adapun indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan yang disampaikan oleh Wakil Keua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily (dalam dpr.go.id) adalah graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH untuk mandiri secara sukarela melepaskan diri untuk tidak lagi menerima bantuan sosial Keluarga Harapan yang telah didapatkan, adanya peningkatan kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*) pada Keluarga Penerima Manfaat, dan adanya peningkatan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat dari sisi kemampuan berwirausaha tersebut.

Selain itu, dalam wawancara tanggal 4 Maret 2020 pukul 09.40 di kantor PKH Kabupaten Banyumas (Dinsospermasdes) dengan Bapak Andi, selain beliau menyampaikan hal serupa diatas, beliau juga menyampaikan hal lain yang menjadi indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan:

> *"Beberapa hal yang menjadi indikator keberhasilan PKH yaitu meningkatnya jumlah partisipasi timbangan untuk balita dan cek kehamilan di bidan atau Puskesmas, menurunnya angka kematian ibu hamil, meningkatnya angka partisipasi anak sekolah serta angka kehadiran siswa di sekolah".*

4. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Adapun dasar hukum Program Keluarga Harapan adalah:

a. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010, tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 19: "Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan".
b. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 3: "Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan; memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya", Pasal

15: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan”, Pasal 16: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa”.

c. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 12 ayat 2-4: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial. Pemberian bantuan langsung berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai diatur dalam Peraturan Presiden”. Pasal 13: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan”.
d. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
e. Inpres nomor 3 tahun 2010, tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
f. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan.

5. Mekanisme Penyaluran Program Keluarga Harapan
   a. Pembuatan rekening penerima bantuan.
   b. Sosialisasi dan edukasi.
   c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
   d. Proses penyaluran bantuan sosial.
   e. Penarikan dana bantuan sosial.
   f. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan.

IAIN PURWOKERTO

g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial (Kementrian Jaminan Sosial Keluarga 2018).

6. Hak dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan

a. Hak Peserta PKH

1) Menerima bantuan sosial
2) Pendampingan sosial
3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial
4) Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

b. Kewajiban Peserta PKH

Kewajiban peserta PKH terdiri dari 4 hal yaitu:

1) Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/ menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun
3) Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan. Berdasarkan kriteria komponen kewajiban peserta PKH adalah sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

a) Komponen kesehatan

Pada ibu hamil/ nifas, pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak minimal 4 kali selama masa kehamilan, melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan ibu nifas 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan; pada bayi usia 0-11 bulan: pemeriksaan kesehatan 3 kali dalam 1 bulan pertama, ASI Ekslusif selama 6 bulan pertama, imunisasi lengkap, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan setiap bulan, mendapat suplemen vitamin A satu kali pada usia 6-11 bulan, pemantauan perekembangan minimal 2 kali dalam setahun; Bayi usia 1-5 tahun: imunisasi tambahan, penimbangan berat badan setiap bulan, pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali dalam setahun; usia 5-6 tahun: penimbangan berat badan, berat badan, dan pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun.

b) Komponen pendidikan (pada usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD, SMP, SLTA): terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan, minimal 85% kehadiran di kelas.

c) Komponen kesejahteraan sosial, meliputi penyandang disabilitas berat: pihak keluarga atau pengurus melayani, merawat, dan memastikan pemeriksaan kesehatan bagi penyandang disabilitas berat minimal 1 tahun sekali dengan menggunakan layanan home visit (tenaga kesehatan datang ke rumah KPM penyandang disabilitas berat) dan layanan *home care* (pengurus, memandikan, mengurusi, dan merawat KPM PKH); pada lanjut usia 60 tahun ke atas: memastikan pemeriksaan kesehatan serta penggunaan layanan Puskesmas Santun Lanjut Usia, layana *home care* (pengurus mewarat, memandikan, dan

mengurusi KPM lanjut usia), dan *day care* (mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, lari pagi, senam sehat, dan lain sebagainya) bagi lanjut usia tersebut minimal 1 tahun sekali (D. J. Keluarga, 2019).

7. Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan diberikan dengan ketentuan. Sementara itu, bantuan komponen diberikan kepada maksimal empat anggota keluarga yang memenuhi komponen program (kemensos.go.id). Adapun nilai manfaat tahunan Program Keluarga Harapan menurut komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Nilai Manfaat Tahunan Program Keluarga Harapan

No.	Komponen	Subkomponen	Nilai Manfaat Per Tahun (Rp)
1.	Komponen Kesehatan	Ibu Hamil/ Nifas	1.000.000,-
		Anak Usia Dini 0 s.d 6 tahun	1.000.000,-
2.	Komponen Pendidikan	Anak SD/Sederajat	900.000,-
		Anak SMP/Sederajat	1.500.000,-
		Anak SMA/Sederajat	2.000.000,-
3.	Komponen Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Berat	2.400.000
		Lanjut Usia	2.000.000,-

Sumber: *Data Sekunder yang Diolah*

Selama satu tahun anggaran, dana bansos PKH disalurkan dalam empat tahap, yaitu tahap pertama (Januari), kedua (April), ketiga (Juli), dan keempat (Oktober). Akan tetapi pada kondisi pandemic seperti sekarang ini, pemerintah memberikan kebijakan dengan mencairkan dana tersebut setiap bulan kepada KPM (Hasil wawancara dengan pendamping PKH, 2020).

8. Sanksi-Sanksi

a. Bagi peserta PKH

Sanksi dalam hal penangguhan dan pembatalan diberlakukan apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dengan ketentuan:

1) Tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan secara rutin setiap bulannya berupa pengurangan nominal bantuan sebesar 10% pada setiap tahap penyaluran bantuan.
2) Jika tiga bulan berturut-turut seluruh anggota PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan/ atau pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan maka pengurangan nominal bantuan sebesar 100% atau tidak mendapatkan bantuan akan tetapi masih menjadi peserta PKH.
3) Jika enam bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan, maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH secara permanen meskipun masih memenuhi kriteria PKH.
4) Khusus bagi daerah pengembangan yang infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial belum memadai maka penerapan sanksi akan dilakukan secara bertahap.
5) Jika dalam tiga kali siklus penyaluran berturut-turut atau selama sembilan bulan peserta PKH tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
6) Keluarga miskin terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai peserta PKH, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH
7) Peserta yang telah dikeluarkan kesepesertaanya, tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta PKH.

b. Bagi pendamping PKH

Bagi pendamping yang KM didampinginya tidak memenuhi kondisionalitas akan diberikan sanksi dapat berupa:

IAIN PURWOKERTO

1) Teguran secara lisan maupun tertulis.
2) Penundaan pembayaran honorarium.
3) Penghentian kontrak kerja

D. Landasan Teologis

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai usaha untuk meningkatkan ekonomi juga sesuai dengan ajaran Islam, karena Islam memandang, bahwa kegiatan ekonomi merupakan tuntutan kehidupan, sebab Islam telah menjamin tiap orang secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِيْنَ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka Berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari Rizky nya. Dan hanya kepada-nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam mempertahankan hidupnya, manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan memanfaatkan segala apa yang ada di muka bumi. Karena manusia adalah makhluk yang selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik moral maupun material, baik itu kebutuhan penting maupun yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada.

IAIN PURWOKERTO

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk memanfaatkan segala yang ada di bumi. Tetapi manusia harus memperhatikan juga batasan serta aturan dalam mengelola dan memanfaatkan apa yang Allah berikana di muka bumi. Selain itu, manusia diperintahkan untuk selalu beribadah kepada Allah dan senantiasa berbuat baik kepada sesama. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَارَ الْاَخِرَةِ، وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَا، وَاَحْسِن كَمَا اَحْسَنَ اللَّهُ اِلَيْكَ، وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ، اِنَّ اللَّهَ لاَيُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Kemudian, kegiatan pemberdayaan ekonomi sebagai usaha meningkatkan ekonomi masyarakat berarti juga sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena Indonesia adalah termasuk diantara negara yang menjadikan kesejahteraan bangsanya sebagai tujuannya**.** Selain itu, kesejahteraan juga merupakan tujuan dari ajaran agama Islam dalam bidang ekonomi. Sebagaimana dijelaskan pada ayat sebelumnya di atas, manusia diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup serta menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi. Karena selain untuk meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan, Allah juga memerintahkan agar manusia senantiasa bekerja keras agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah yang mengalami keterbelakangan sosial serta tingkat kesejahteraan dan ekonomi yang rendah. Seperti dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 9:

وَالْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْتَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيْدًا

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Kaitannya dengan perintah untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan memperhatikan kesejahteraan, Imam AL-Ghazali mengatakan bahwa kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar. Lima tujuan dasar tersebut yaitu: (1) adama (*ad-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*maal*), (5) intelek atau akal (*aql*). Beliau mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial meliputi kebutuhan (*daruriat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajaat*), dan kemewahan (*tahsiniaat*). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian dan perumahan (Karim, 2015:88).

IAIN PURWOKERTO

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, seperti individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat (Suryabrata, 2010: 80). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan metode penelitian deskriptif-kualititatif. Di mana dalam penelitian ini data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Apabila angka, maka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkip *interview*, catatan lapangan, foto, dokumen-dokumen, dan lain-lain (Danim, 2002: 51).

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Karangnangka yang menjadi peserta atau anggota dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping PKH Desa Karangnangka. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *purposive sampling. Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2015: 219). Saat perolehan jawaban dari responden sudah jenuh, maka pengambilan sampel dianggap sudah cukup. Dimana dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) PKH dengan kriteria telah menerima manfaat PKH sama dengan atau lebih dari 3 tahun.

2. Objek Penelitan

Objek penelitan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah tingkat ekonomi masyarakat yang menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

C. Sumber Data

Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Data tersebut mempunyai peranan untuk menjelaskan secara deskriptif suatu masalah. Berdasarkan sumbernya data digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walapun yang dikumpulkan adalah data yang asli (Tika, 2006: 57-58).

IAIN PURWOKERTO

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Secara umum teknik pengumpulan data terdiri beberapa kelompok, yaitu:

1. Observasi (Pengamatan)

   Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa, baik berupa manusia, benda mati, maupun alam. Menurut Riyanto, observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan

terhadap obyek penelitian yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Teknik pelaksanaan observasi dapat dilaksanakan secara langsung yaitu peneliti atau pengamat berada secara langsung bersama obyek yang diteliti, dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diteliti.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain, wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.

Ada dua jenis wawancara yang lazim digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanyakan dan materi pertanyaannya. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaannya.

IAIN PURWOKERTO

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian, seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada (Tanzeh, 2011: 84-92).

E. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, data tersebut harus segera dianalisis dan dituangkan dalam bentuk laporan. Adapun tujuan analisis data

ialah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metose apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, serta mengungkapkan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki (Husaini Usman, 2006: 86).

Miles and Huberman menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul adalah melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Oleh karena itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa terdapat tiga kegiatan analisis data, yaitu: (1) reduksi data (*data reduction*); (2) data display (*display data*); (3) penarikan kesimpulan/ verifikasi.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempetajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Data Display (*Display Data*)

   Kegiatan utama kedua dalam kegiatan analisis data adalah data display. Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau (Yusuf, 2017: 407-409).

3. Kesimpulan/Verifikasi

   Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2016: 253).

IAIN PURWOKERTO

F. Teknik Uji Keabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini, teknik uji keabsahan yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya, misalnya:

1. Triangulasi dengan sumber

   Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, kemudian membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti rakyat biasa, orang-orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

IAIN PURWOKERTO

2. Triangulasi dengan metode

   Dalam teknik ini, terdapat dua strategi yang harus dilakukan, yaitu dengan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Triangulasi dengan teori

   Triangulasi dengan teori berarti bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu teori atau lebih. Hal ini dipertegas bahwa yang demikian dinamakan penjelasan banding (*reveal explanation*).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan adanya perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks studi sewaktu peneliti mengumpulkan data tentang berbagai kejadian atau peristiwa dan hubungan dari berbagai pendapat. Dengan kata lain, bahwa dengan triangulasi peneliti kualitatif dapat melakukan *check and recheck* hasil temuannya dengan jalan membanding-bandingkan berbagai sumber, metode, dan teori (Djunaidi Ghony, 2017: 322-323).

IAIN PURWOKERTO

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Karangnangka

Desa Karangnangka adalah salah satu desa dari 14 desa di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Dan merupakan desa pegunungan dengan struktur geografis yang berbukit-bukit.

1. Kondisi Geografis Desa Karangnangka
   a. Luas Wilayah : 179 Ha
      1) Sawah : 113 Ha
      2) Pemukiman : 59 Ha
      3) Lain-lain : 7 Ha
   b. Batas Wilayah Desa Karangnangka
      1) Sebelah Utara : Desa Kutaliman
      2) Sebelah Timur : Desa Kebumen
      3) Sebelah selatan : Desa Beji dan Kebocoran
      4) Sebelah Barat : Desa Keniten
   c. Pembagian Wilayah Administrasi Desa Karangnangka
      1) Jumlah Rukun Tangga : 16 Rukun Tangga
      2) Jumlah Rukun Waraga : 6 Rukun Warga
      3) Jumlah Dusun : 2 Dusun
2. Kondisi Demografis Desa Karangnangka
   d. Jumlah Penduduk
      1) Penduduk Laki-Laki : 2621 jiwa
      2) Penduduk Perempuan : 2519 jiwa
      3) Jumlah Penduduk Total : 5140 jiwa
      4) Jumlah Kepala Keluarga : 1639 Kepala Keluarga
      5) Kepadatan Penduduk : 2 per KM
   e. Mata Pencaharian Pokok
      1) Petani : 192 orang
      2) Buruh Tani : 208 orang

IAIN PURWOKERTO

3) Buruh Harian Lepas : 394 orang
4) Pegawai Negeri Sipil : 77 orang
5) Pedagang : 119 orang
6) Wiraswasta : 276 orang
7) Pensiunan PNS/TNI/POLRI : 53 orang
8) Dukun Kampung Terlatih : 2 orang
9) Dosen Swasta :1 orang
10) Kepolisian RI : 6 orang

f. Pendidikan Menurut Usia dan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
Tamat SD/MI/Sederajat	741	801	1.542
Tamat SMP/ Sederajat	486	415	901
Tamat SMA/Sederajat	480	422	902
Tamat D-1/Sederajat	-	-	-
Tamat D-2/Sederajat	11	18	29
Tamat D-3/Sederajat	34	36	70
Tamat S-1/Sederajat	77	77	154
Tamat S-2/Sederajat	6	4	10
Tamat S-3/Sederajat	-	-	-
Jumlah	1.835	1.773	3.608

Sumber: *Data Sekunder yang Diolah*

g. Bangunan

1) Perkantoran : Kantor Desa
2) Sarana Ibadah : Masjid 1 unit
3) Sarana Pendidikan :
   a) SD : 1 unit (274 siswa)
   b) MI : 1 unit (152 siswa)

IAIN PURWOKERTO

c) TK : 2 unit (82 siswa)

d) PAUD : 2 unit (47 siswa)

4) Sarana Kesehatan : PKD 1 unit

5) Sarana Olahraga :

a) Lapangan sepak bola 1 unit

b) Gedung Serbaguna/ Gedung Olah Raga "Wasesa" 1 unit

6) Panjang Jalan :

a) Jalan kabupaten 3 km (beraspal)

b) Jalan desa 8,5 km (beraspal 8 km)

c) Jalan lingkungan 1,5 km

d) Jalan tani 1,3 km (beraspal 0,9 km) (Data Sekunder diolah, 2020).

B. Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karangnangka

1. Sejarah Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karangnangka

Program Keluarga Harapan di Desa Karangnangka sudah ada sejak tahun 2013. Yang mana program tersebut merupakan salah satu sasaran dari pelaksanaan PKH di tingkat Kabupaten Banyumas, kemudian turun ke tingkat kecamatan dan desa sebagai sasaran program. Seperti yang tertera pada **Tabel 1.1**, terdapat 76 keluarga yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di awal adanya PKH di Desa Karangnangka. Dimana KPM yang terpilih merupakan keluarga yang telah memenuhi kriteria sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Dan sejak awal adanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga yang menerima manfaat PKH telah terbagi ke masing-masing RT yang ada di Desa Karangnangka (Hasil wawancara dengan perangkat desa, 2020).

2. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karangnangka

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karangnangka sudah ada sejak tahun 2013, dengan jumlah awal Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 76 KPM dan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 ini jumlahnya menjadi 196 KPM. Hal tersebut bukan berarti hanya terdapat peningkatan jumlah KPM, akan tetapi pada setiap tahun jumlah KPM mengalami perubahan, baik mengalami peningkatan maupun penurunan. Peningkatan jumlah penerima manfaat yang sering terjadi disebabkan karena adanya penambahan jumlah KPM yang diberlakukan atas dasar aturan dari pemerintah pusat. Dimana calon penerima manfaat terlebih dahulu dilakukan validasi sebelum akhirnya menjadi KPM PKH.

Selain mengalami peningkataan pada jumlah penerima manfaat karena adanya penambahan validasi, jumlah penerima manfaat PKH di Desa Karangnangka juga ada kalanya mengalami penurunan. Penurunan tersebut dikarenakan adanya pengurangan atau graduasi secara alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran sosial-ekonomi. Graduasi secara alamiah terjadi karena berakhirnya masa kepesertaan KPM PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan program, seperti karena faktor habis komponen. Misalnya karena anak sekolah yang sudah lulus belajar 12 tahun atau lansia yang sudah meninggal dunia, oleh karena itu keluarga miskin yang menjadi penerima manfaat secara alami sudah tidak lagi menjadi KPM PKH. Sedangkan graduasi hasil pemutakhiran sosial-ekonomi adalah berakhirnya masa kepesertaan KPM PKH karena tidak lagi berstatus ekonomi miskin meskipun masih memiliki kriteria komponen (Hasil wawancara dengan pendamping PKH, 2020). Adapun proses penyelenggaraan PKH meliputi 10 tahapan, yaitu:

a. Perencanaan
b. Penetapan calon peserta PKH
c. Validasi data calon peserta PKH
d. Penetapan KPM PKH
e. Penyaluran dana bansos PKH
f. Pendampingan PKH
g. Peningkatan kemampuan keluarga
h. Verifkasi komitmen KPM

i. Pemutakhiran data KPM

j. Transformasi kepesertaan PKH.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH juga menerima manfaat lain selain adanya dana sosial dari pemerintah. Manfaat tersebut antara lain: adanya penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setiap bulan yang berupa sembako dan makanan penambah gizi lain seperti daging, telur dan sayuran; adanya penerimaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai bentuk bantuan atau jaminan kesehatan bagi keluarga miskin; dan adanya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai sarana untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan berwirausaha bagi KPM PKH.

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

Kesejahteraan telah menjadi bagian penting dari sebuah negara. Berbagai cara, metode, aturan, alat, pendekatan, ataupun kebijakan telah dipilih dan dilakukan oleh sebuah negara dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut (Purwana, 2014: Vol. 11). Setiap bangsa menginginkan terciptanya masyarakat yang bebas dari kemiskinan, masyarakat yang makmur dan masyarakat yang tingkat perekonomiannya semakin maju, sehingga kesejahteraan akan tercipta. Dalam usaha meningkatkan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia memberikan fasilitas dan pelayanan sebagai upaya menciptakan hal tersebut. Salah satunya dengan adanya Program Keluarga Harapan, yang mana dalam program tersebut masyarakat miskin tidak hanya diberikan bantuan berupa finansial saja, akan tetapi mereka diberdayakan oleh pemerintah dengan tujuan agar tercipta kemandirian serta kesejahteraan dalam jangka panjang.

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan

Menurut Mubyarto (2000) pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya

untuk mengembangkannya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk mengubah pola pikir serta meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian masyarakat (Bashith, 2012: 27). Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Terdapat beberapa pola pemberdayaan ekonomi yang diterapkan melaui kegiatan Program Keluarga Harapan sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan, kemandirian, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta mencapai tujuan dari pemberdayaan tersebut:

Pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha dengan memberikan pelatihan. Menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki ketrampilan berwirausaha adalah salah satu indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan tujuan agar masyarakat lebih mandiri, sejahtera dan tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah. KUBE (Kelompok Usaha Bersama) adalah wadah untuk melatih serta mengembangkan ketrampilan berwirausaha bagi KPM. KUBE “Maju Bersama” desa Karangnangka adalah wadah besar bagi setiap KPM untuk berlatih bagaimana memulai dan mengembangkan usaha. KPM diberikan kebebasan untuk mengatur dan menetukan usaha apa yang akan mereka jalankan melalui KUBE, akan tetapi selalu ada bimbingan, arahan serta pendampingan dari pendamping PKH.

IAIN PURWOKERTO

KUBE “Maju Bersama” adalah KUBE besar yang pertama didirikan pada tahun 2018 dan dalam kepengurusannya terdiri dari perwakilan anggota KPM dari setiap kelompok yang ada. Kepengurusan KUBE “Maju Bersama” Desa Karangnangka terdiri dari 14 orang, yang mana 14 orang tersebut adalah perwakilan KPM dari 7 kelompok PKH yang ada di Desa Karangnangka. Sehingga masing-masing dari kelompok PKH terdapat 2 anggota KPM mewakili untuk menjadi pengurus KUBE “Maju Bersama”. Bentuk usaha dalam KUBE “Maju Bersama” adalah usaha penjualan sembako dan gas LPG 3 kg. Dimana sistem penjualan sembako dipusatkan dalam 1 tempat yang dikoordinir oleh 1 pengurus KUBE, sedangkan penjualan gas dengan melakukan pembagian beberapa unit gas kepada anggota KUBE. Dan sistem pembagian keuntungannya adalah bagi hasil.

Tabel 4.2
Daftar Pengurus KUBE “Maju Bersama”
Desa Karangnangka

No.	Jabatan	Nama
1	Ketua 1	Hindun Widiastuti
2	Ketua 2	Luji Sarini
3	Bendahara	1. Endarwati 2. Sumini
4	Sekretaris	Supriati
5	Anggota	1. Feni 2. Ning 3. Riawati 4. Musrifah 5. Siti 6. Rakinah 7. Sunarti 8. Yuli 9. Ariati

Sumber: Data Primer yang Diolah

Selain terdapat KUBE “Maju Bersama” yang menjadi KUBE besar, di Desa Karangnangka juga terdapat 2 KUBE kecil yang merupakan

KUBE milik 2 diantara 7 kelompok PKH yang ada. KUBE kecil tersebut merupakan bentuk inovasi dari anggota KPM yang menjadi pengurus dalam KUBE "Maju Bersama" sebagai cara untuk mengajak KPM lain untuk memulai usaha. Dua KUBE kecil tersebut memiliki usaha penjualan sembako dan penjualan makanan ringan hasil pembuatan dari beberapa KPM yang memiliki bakat serta ketrampilan dalam membuat makanan yang layak dijual (Hasil wawancara dengan Ketua KUBE "Maju Bersama, 2020).

Berikut pernyataan dari Ibu Luji terkait dengan KUBE dan usahanya saat diwawancarai pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 10.00 di kediamannya:

> *"awalnya saya mulai ikut usaha di KUBE "Maju Bersama" karena sebuah kewajiban dan tuntutan mba karna saya ikut jadi pengurus dan temapat saya jadi pusat usaha. Jadi pertama KUBE berjalan usahanya itu tempatnya di sini, jualan sembako. Setelah berjalan 1 tahun, alhamdulillah akhirnya saya mulai buka warung usaha pribadi saya sendiri mba. Sedangkan tempat KUBE sekarang ada sendiri dan dipegang oleh ketua KUBEnya mba" (wawancara dengan Bu Luji, 2020).*

Gambar 4.1
Usaha Warung Milik KPM PKH
Desa Karangnangka

Selain bu Luji, Bu Yuli juga merasakan manfaat dari adanya KUBE yang menjadi wadah bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memulai dan mengembangkan usaha, sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kehidupan. Seperti pernyataannya saat diwawancara pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 11.32 sebagai berikut:

> *"dulu pertama ikut PKH saya langsung masuk dalam keanggotaan KUBE mba, sampe kemudian saya diamanahi untuk mengordinir KUBE kecil di kelompok saya. Nah setelah saya dapat bantuan PKH dan aktif di organisasi, Alhamdulillah yang sebelumnya saya belum bisa mulai usaha karena keterbatasan modal sekarang saya bisa mulai usaha mba. Saya biasa nerima pesanan snack untuk acara-acara, trus saya jualan nugget ayam sama saya jualan online kebutuhan rumah tangga juga mba" (wawancara dengan bu Yuli, 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan penulis di atas, dapat diketahui bahwa KUBE "Maju Bersama" Desa Karangnangka yang ada sejak tahun 2018 telah memberikan perubahan bagi setiap anggota yang aktif di dalamnya. Perubahan pola pikir serta perilaku masyarakat terkait dengan wirausaha dan adanya tambahan pendapatan adalah bentuk perubahan dari adanya KUBE bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang aktif di dalamnya.

Selain pelatihan melalui KUBE "Maju Bersama" dan kegitan pertemuan rutin setiap bulan, pelatihan kewirausahaan juga difasilitasi oleh pihak pemerintah desa yang diikuti oleh masyarakat Desa Karangnangka pada umumnya bukan hanya oleh KPM PKH. Tetapi tidak memungkiri KPM PKH juga memanfaatkan peluang dan merasakan manfaat dari pelatihan yang diadakan oleh pihak pemerintah desa di luar kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH). Seperti yang dituturkan oleh Ibu Hindun Widiastuti pada wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 15.02 berikut:

> *"Setelah saya ikut dan aktif dalam keanggotaan PKH, Alhamdulillah saya juga aktif setiap ada kegiatan yang diselenggerakan desa mba. Yang sangat saya rasakan manfaatnya untuk saya itu salah satunya pas tahun kemaren saya ikut pelatihan pembuatan piring lidi mba. Dari pelatihan itu kita sebagai peserta benar-benar dilatih dari nol sampai bisa. Bahkan dibantu juga memasarkannya juga kalo kita mau memasarkan hasil karya kita. Saya juga awal-awal sering dikasih bagian buat bikin piring sampai ratusan kalo guru pelatihan itu lagi banyak orderan, dari situ saya jadi ada tambahan pemasukan mba. Dan Alhamdulillah saya juga sudah punya murid pelatihan juga mba. Pokoknya Alhamdulillah banget mba karena saya ikut PKH, saya*

jadi bisa aktif dimana-mana jadi banyak temen juga. Selain nambah pendapatan, nambah juga ketrampilan, pengalaman, wawasan dan banyak teman mba" (wawancara dengan Ibu Hindun Widiastuti, 2020).

Gambar 4.2
Kerajinan Hasil Pelatihan KPM PKH
yang Sudah Dipasarkan

Kedua, memberikan bantuan permodalan. Permodalan yang ada dalam Program Keluarga Harapan (PKH) salah satunya berkaitan dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dimana bantuan permodalan ini diberikan pemerintah melalui Dinas Sosial kepada setiap KUBE yang ada di setiap daerah atau bahkan kelompok. Dan bantuan permodalan tersebut disalurkan dengan ketentuan-ketentuan khusus, yang diantaranya adalah dengan syarat setiap KUBE telah berjalan dengan baik, memiliki bentuk usaha yang riil dan memiliki tempat untuk berwirausaha. Bukan disalurkan semata-mata kepada KUBE yang belum berjalan atau KUBE yang hanya memiliki gambaran usaha yang akan dijalankan. KUBE "Maju Bersama" Desa Karangnangka sebelum akhirnya mendapat bantuan tambahan modal dari pemerintah, awalnya mereka menghimpun modal dari masing-masing peserta PKH sebesar Rp 50.000. Kemudian setelah usahanya berkembang, pendamping mengupayakan kepada Dinas Sosial untuk memberikan bantuan modal kepada KUBE "Maju Bersama" Desa Karangnangka (Hasil wawancara dengan ketua KUBE Maju Bersama, 2020).

Selain bantuan permodalan untuk keberlangsungan kegiatan usaha melalui KUBE, bentuk bantuan inti yang juga merupakan upaya

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui adanya Program Keluarga Harapan adalah dengan memberikan bantuan dana kepada Keluarga Penerima Manfaat. Bantuan dana tersebut difungsikan sesuai dengan komponen yang menjadi sebab keluarga miskin menjadi peserta dalam Program Keluarga Harapan, diantaranya bantuan dana untuk biaya pendidikan anak usia sekolah, bantuan dana untuk biaya kebutuhan balita dan ibu hamil, serta bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat miskin lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Ketiga, pemberian bantuan berupa pendampingan. Bentuk pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang berupa pendampingan adalah adanya pendampingan setiap kegiatan yang berkaitan dengan peserta PKH, termasuk pendampingan dalam kegiatan KUBE, serta pendampinan pada pertemuan setiap bulan antara pendamping dan semua peserta atau KPM PKH yang disebut dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dimana pertemuan tersebut merupakan bentuk pemberdayaan berupa pendampingan dengan cara pemberian pengetahun, dan merupakan sebuah proses belajar terstruktur dengan tujuan untuk mempercepat perubahan perilaku pada KPM PKH yang mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Pada saat ini, tersedia lima modul P2K2, yaitu: kesehatan dan gizi, pendidikan, ekonomi, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial (Hasil wawancara dengan pendamping PKH Desa Karangnangka, 2020).

Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali secara terjadwal. Pelaksanaan P2K2 dilakukan di minggu pertama setiap bulannya, biasanya antara tanggal 1 sampai 7 setiap bulan dan diikuti oleh masing-masing KPM dengan jadwal pelaksanaan yang berbeda setiap kelompok. Pertemuan P2K2 ini biasanya bertempat di Aula Balai Desa Karangnangka dan juga secara bergilir bertempat di kediaman KPM PKH Desa Karangnangka. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dengan cara pendampingan dan pemberian edukasi atau pendidikan kepada ibu-ibu KPM, yang bertujuan untuk merubah pola pikir serta perilaku masyarakat yang mengarah dan mendukung pada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Manfaat dari adanya pendampingan pada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) telah dirasakan oleh KPM PKH, seperti yang disampaikan Ibu Musrifah saat diwawancarai pada tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10.15 sebagai berikut:

> *"tiap bulan ada kumpulan P2K2 mba, saya yang sebelumnya itu ibu rumahan yang jarang kemana-mana karna ada kumpulan gitu saya jadi nambah temen mba. Biasanya kan cuma sama ibu-ibu yang se RT, sekarang jadi nambah temen yang beda RT. Karna ikut P2K2 ini saya juga jadi nambah wawasan mba dari materi-materi yang disampaikan pendamping, Alhamdulillah manfaat yang saya dapatkan karna ikut PKH ini sangat banyak mba" (wawancara dengan Ibu Musrifah).*

Hal serupa juga disampaikan oleh Bu Hindun saat diwawancarai oleh penulis pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 15.02 di kediamannya RT 02 RW 06, berikut ini:

> *"adanya P2K2 tiap bulan sebelum adanya corona ini bagi saya sangat bermanfaat mba. Nambah ilmu baru buat saya. Hal-hal kecil yang berkaitan sama kegiatan kita sebagai ibu rumah tangga itu ada ilmunya semua sebenernya mba, nah itu semua kita dapatkan ilmunya dari situ mba yang dijelaskan sama pendamping kita" (wawancara dengan Ibu Hindun).*

Keempat, memberikan bantuan motivasi moril. Pemberian bantuan motivasi moril yang dilakukan oleh pendamping PKH kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) adalah dengan memberikan pengarahan serta motivasi tentang pentingnya beribadah dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa yang harus selalu beriringan dengan adanya kerja keras dan ikhtiar untuk memperoleh hasil maksimal. Seperti yang diterangkan oleh Leni sebagai pendamping PKH Desa Karangnangka pada saat wawancara

di kediamannya Desa Keniten tanggal 8 April 2020 pukul 15.30, sebagai berikut:

> "*Setiap kali pertemuan yang diadakan setiap satu bulan sekali ada semacam materi yang saya sampaikan selain materi wajib yang harus ada di P2K2 ya mba. Materi itu tentang pentingnya berdoa, berusaha dan bertawakal kepada Allah SWT atas apa yang telah kita kerjakan. Maksud saya menyampaikan hal tersebut ya tidak lain adalah dengan niat untuk mengingatkan kepada temen-temen peserta PKH sekaligus sebagai motivasi buat mereka. Oh iya mba selain saya menyampaikan sambutan, di awal sebelum acara dimulai mereka juga biasanya rutin membaca tahlil atau berjanjenan sambil nunggu saya datang mba" (wawancara dengan Leni pendamping PKH Desa Karangnangka, 2020).*

2. Tingkat Ekonomi Masyarakat dengan Adanya Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH, peneliti mengamati adanya perubahan tingkat ekonomi pada masyarakat yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat dari adanya pelaksanaan dan pemberdayaan yang ada dalam Program Keluarga Harapan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya ekonomi masyarakat, antara lain:

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bentuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pasalnya, kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada sejumlah KPM PKH yang memiliki anak usia sekolah, mereka merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dan jaminan pendidikan melalui Program Keluarga Harapan. Dengan adanya bantuan PKH untuk anak sekolah, pendidikan anak-anak mereka menjadi lebih terjamin dan bukan lagi menjadi beban besar

bagi para orang tua kurang mampu. Seperti penuturan Ibu Sunarti saat diwawancarai pada tanggal 2 Agustus 2020 pukul 09.45, sebagai berikut:

> *"Alhamdulillah mba, biaya pendidikan anak terbantu. Dulu sebelum ada PKH, anak saya yang udah menikah sekolahnya cuma sampai tingkat SD. Yaa mau* bagaimana *wong kita orang ngga punya, buat makan aja susah. Jadi anak saya itu sekolahnya ngga selesai. Alhamdulillah sekarang ada PKH adik-adiknya bisa melanjutkan sekolah mba, karna biayanya dibantu sama pemerintah, keperluan anak saya untuk sekolah kaya beli sepatu, tas sama yang lain-lain juga pake uang bantuan itu mba, jadi ya terbantu sekali" (wawancara dengan Ibu Sunarti).*

Dari pernyataan yang disampaikan oleh KPM PKH yaitu Bu Sunarti di atas, sangat jelas bahwa dengan adanya bantuan yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sangat membantu perekonomian, termasuk membantu kelancaran pendidikan anak-anak mereka. Karena pendidikan adalah salah satu cara meningkatkan ekonomi serta pencapaian kesejahteraan dalam jangka panjang di masa yang akan datang. Melalui pendidikan anak-anak mereka, berarti mereka telah berupaya untuk tidak menciptakan generasi yang lemah dan mengalami keterbelakangan sosial. Sebagaimana firman Allah dalam Al- Qur'an Surat An- Nisa ayat 9:

وَالْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْتَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيْدًا

> *Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

IAIN PURWOKERTO

b. Pendapatan

Dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan menjadikan Keluarga Penerima Manfaat mendapatkan tambahan penghasilan. Jumlah tamabahan tersebut berupa uang setelah adanya pencairan sebesar sama dengan ketentuan penerimaan komponen. Dan pendapatan dari dana bantuan tersebut digunakan untuk biaya yang berkaitan dengan masing-masing komponen penerima.

Seperti pernyataan Ibu Darsiti saat diwawancarai pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 16.05, sebagai berikut:

> *"pendapatan keluarga saya ya jadi bertambah mba setelah setiap 3 bulan sekali bantuannya cair. Dan itu sangat meringankan saya ya mba, soalnya biaya buat anak sekolah sama buat keperluan anak saya yang bayi kan pake uang itu. Jadi yaa suami saya kerja buat kebutuhan sehari-hari aja mba" (wawancara dengan ibu Darsiti, 2020).*

Selain itu, banyak juga Keluarga Penerima Manfaat yang kemudian memulai usaha setelah mereka terbantu dengan adanya Program Keluarga Harapan. Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dana dari Program Keluarga Harapan, karena pendapatan dari hasil kerja mereka yang seharnya digunakan untuk biaya pendidikan anak atau biaya kebutuhan balita kini sudah diringankan oleh pemerintah. Akhirnya mereka memanfaatkannya dengan mulai berwirausaha sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan tambahan, dengan harapan agar kehidupan dan keadaan sosial ekonomi mereka semakin membaik. Sebagaimana pernyataan dari Ibu Luji saat wawancara tanggal 3 Agustus 2020 pukul 10.30, sebagai berikut:

> *"iya mba, ibaratnya biaya pendidikan sama kebutuhan anak-anak saya kan udah dijatah sama pemerintah, jadi uang hasil kerja suami yang harusnya buat itu jadi bisa sedikit-sedikit saya kumpulkan sebagai modal usaha saya mba. Alhamdulillah dulu awalnya saya mulai usaha ikut di KUBE, sekarang saya udah bisa buka warung kecil-kecilan. Itung-itung buat tambahan penghasilan keluarga saya mba".*

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada KPM yang aktif dalam KUBE dan KPM yang memiliki usaha setelah adanya PKH, penulis mendapati bahwa mereka telah merasakan perubahan yang dialami setelah mereka memiliki usaha. Perubahan yang mereka rasakan bukan hanya dari segi perubahan pola pikir, akan tetapi perubahan pada pendapatan keluarga mereka. Seperti yang dijelaskna oleh bu Luji dan Bu Yuli saat wawancara tanggal 3 Agustus, sebagai berikut:

> *"sebelum ikut PKH saya cuma ibu rumah tangga biasa mba, uang yang cari cuma suami. Setelah dapat bantuan PKH saya mulai buka usaha dengan menerima pesenan snack, bikin nugget ayam sama jual perabotan rumah tangga lewat online mba. Hasilnya si belum seberapa mba, tapi Alhamdulillah ya kalo diitung-itung kurang lebih tiap minggu saya ada pemasukan bersih Rp 50.000" (wawancara dengan Ibu Yuli, 2020).*

Saat diwawancarai di kediamnannya RT 01 RW 04 pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 10.15, Bu Luji Sarini juga menyampaikan adanya perubahan yang dialami setelah adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dan setelah beliau memiliki usaha sendiri.

> *"kalo dulu pendapatan dari suami perbulan Rp 1.000.000, sekarang karna saya buka warung pendapatan jadi nambah mba. Ya tiap bulan jadi Rp 1.500.000 kurang lebih mba" (wawancara dengan Ibu Luji Sarini).*

Seperti Ibu Luji dan Ibu Yuli di atas, Ibu Sri, Ibu Asmariah, Ibu Sunarti dan Bu Mar juga memiliki usaha setelah mendapatkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan tujuan agar mereka memiliki tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi serta mencapai kesejahteraan dan memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Namun tidak sedikit pula keluarga yang belum memiliki tambahan penghasilan selain penghasilan dari dana bantuan PKH. Beberapa dari mereka yang belum memiliki tambahan

penghasilan disebabkan karena mereka belum memiliki kesadaran akan manfaat yang didapatkan dari berwirausaha, ada juga yang disebabkan karena kesibukan yang dimiliki oleh mereka seperti mengurus anak-anak mereka yang masih balita. Kemudian ada juga yang merasa bahwa dana bantuan yang diberikan itu hanya membantu mengurangi pengeluaran sehingga pemdapatan yang mereka miliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan belum cukup untuk membuka usaha sampingan. Seperti yang disampaikan Ibu Darsiti pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 16.10, berikut:

> *"dana bantuannya ya khusus untuk keperluan anak sekolah saja mba, suami saya petani jadi penghasilannya ya cuma cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mba, kalo mau buka usaha ya belum ada modalnya" (wawancara dengan Ibu Darsiti).*

Tabel 4.3
Perubahan Pendapatan
pada KPM PKH Desa Karangnangka per bulan

No.	Nama KPM	Pendapatan Sebelum menjadi KPM	Pendapatan Setelah menjadi KPM
1	Luji Sarini	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000
2	Rakinah	Rp. 900.000	Rp. 1.200.000
3	Musrifah	Rp. 950.000	Rp. 1.200.000
4	Hindun Widiastuti	Rp. 1.000.000	Rp. 1.300.000
5	Feni	Rp. 1.000.000	Rp. 1.250.000
6	Yuliati	Rp. 800.000	Rp. 1.000.000
7	Darsiti	Rp. 800.000	Rp. 800.000
8	Endarwati	Rp. 900.000	Rp. 1.200.000
9	Khotimah	Rp. 800.000	Rp. 1.000.000
10	Sutarti	Rp. 800.000	Rp. 900.000
11	Nangimah	Rp. 700.000	Rp. 800.000
12	Sunarti	Rp. 800.000	Rp. 950.000
13	Asmariah	Rp. 900.000	Rp. 1.250.000
14	Sri	Rp. 850.000	Rp. 1.000.000
15	Riswen	Rp. 800.000	Rp. 1.000.000

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa perubahan pendapatan masyarakat dari sebelum mereka menjadi KPM PKH

hingga setelah mereka menjadi KPM PKH cenderung naik. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada sebagian KPM PKH Desa Karangnangka yang menjadi narasumber. Dari hasil wawancara, mereka yang mengalami kenaikan jumlah pendapatan keluarga adalah mereka yang telah menjalankan usaha sehingga mereka memiliki tambahan pemasukan bagi keluarga. Sedangkan mereka yang pendapatannya masih cenderung sama adalah mereka yang belum memiliki usaha. Hal tersebut dikarenakan mereka belum memiliki kesdaran akan manfaat dari berwirausaha dan sebagian mereka masih terkendala pada modal usaha.

Selain pendapatan berupa uang dari dana bantuan maupun pendapatan uang dari hasil usaha, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH juga memiliki pendapatan berupa barang. Pendapatan berupa barang yang mereka dapatkan adalah bantuan pangan non tunai dari pemerintah yang diberikan setiap satu bulan sekali kepada setiap KPM. BPNT tersebut berupa sembako dan makanan penambah gizi seperti daging, telur, buah dan sayur.

c. Jenis Tempat Tinggal dan Fasilitas

Beberapa Keluarga Penerima Manfaat PKH di Desa Karangnangka setelah mendapatkan bantuan PKH dapat sedikit demi sedikit merubah kondisi rumah menjadi lebih rapi dan layak untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Perubahan kondisi rumah ini dilakukan karena keluarga dapat menyisihkan penghasilannya untuk sedikit demi sedikit membeli bahan bangunan yang digunakan untuk perbaikan rumah. Serta ada juga keluarga yang sebelum menjadi peserta PKH mereka masih tinggal bersama orang tua, kemudian setelah terbantu dari adanya PKH mereka sudah memliki tempat tinggal sendiri. Seperti penuturan dari Ibu Rakinah saat wawancara tanggal 2 Agustus 2020 pukul 09.45:

> *"dulu saya masih tiggal bareng orang tua saya mba, sekarang Alhamdulillah sudah punya tempat tinggal sendiri meskipun sangat sederhana".*

IAIN PURWOKERTO

Selain adanya perubahan keadaan serta kelayakan tempat tinggal, beberapa dari mereka juga memiliki perubahan dari segi fasilitas atau kepemilikan kekayaan, seperti pernyataan dari Ibu Luji Sarini saat wawancara tanggal 3 Agustus 2020 pukul 10.00 di kediamannya, berikut ini:

> *"kalo dari segi fasilitas ya sekarang di rumah saya udah ada televisi, kulkas dan peralatan dapur pada umumnya mba, dulu karna masih numpang orang tua ya jadi belum punya. Sekarang Alhamdulillah sudah ada, ya meskipun ngga semuanya barang baru. Karna menurut saya fasilitas-fasilitas itu kan sudah menjadi barang yang wajib ada di rumah ya mba, dan menurut saya kebanyakan orang yang sudah punya. Tapi kalo bentuk barang berharga yang gede-gede paling ya motor karna buat kerja suami si ya mba, kalo kaya emas ya kita belum mampu mba, paling yaa barang-barang wajib itu".*

Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan ekonomi dari segi tempat tinggal dan fasilitas atau kepemilikan kekayaan bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH. Karena dengan adanya bantuan dari Program Keluarga Harapan, mereka dapat memanfaatkan penghasilannya untuk memperbaiki kelayakan tempat tinggal beserta fasilitas-fasilitasnya.

IAIN PURWOKERTO

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi melalui Program Keluarga Harapan pada PKH Desa Karangnangka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan antara lain adanya pemberian pelatihan, dimana pelatihan tersebut berupa pelatihan kewirausahaan dan pelatihan dalam bentuk pemberian edukasi kepada KPM mengenai beberapa aspek, antara lain: pengetahuan tentang pendidikan anak, kesehatan dan gizi, ekonomi dan keuangan serta kesejahteraan sosial. Selain adanya pelatihan, masyarakat juga diberikan bantuan berupa motivasi moril. Pemberian bantuan motivasi moril ini dilakukan oleh pendamping kepada peserta PKH dalam setiap pertemuan rutin. Selain pemberian pelatihan dan bantuan motivasi moril, pola pemberdayaan yang dilakukan melalui Program Keluarga Harapan adalah dengan adanya bantuan permodalan serta adanya pendampingan yang dilakukan pendamping kepada seluruh Keluarg penerima Manfaat (KPM).

IAIN PURWOKERTO

Dari adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui Program Keluarga Harapan ini berdampak pada tingkat ekonomi Keluarga Penerima Manfaat. Program Keluarga Harapan telah membawa perubahan keadaan atau tingkat ekonomi dan kesejahteraan yang nyata pada Keluarga Penerima Manfaat. Perubahan pada tingkat ekonomi tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya ekonomi masyarakat, yaitu dari tingkat pendidikan, pendapatan, jenis tempat tinggal serta fasilitas atau kepemilikan kekayaan. Perubahan tingkat pendidikan bagi KPM yaitu berupa jaminan sekolah bagi anak-anak mereka melalui pemberian dana bantuan untuk keringanan biaya pendidikan. Sehingga tidak

ada lagi anak putus sekolah karena keterbatasan biaya. Kemudian adanya perubahan pada pendapatan KPM. Melalui PKH, KPM mengalami peningkatan pendapatan mereka baik pendapatan berupa uang maupun pendapatan berupa barang. Dan yang selanjtunya yaitu adanya perubahan kondisi rumah menjadi rumah layak huni dan adanya perubahan fasilitas dan kepemilikan kekayaan dari Keluarga Penerima Manfaat.

B. Saran

Setelah adanya kesimpulan dari penelitian ini, selanjutnya penulis menyumbangkan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan proses pengembangan lebih lanjut. Adapun saran-saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Keluarga Penerima Manfaat, hendaknya dapat menggunakan bantuan yang diberikan sebagaimana sesuai dengan ketentuan dan bisa lebih memanfaatkan adanya bantuan tersebut dengan mulai berwirausaha, sehingga KPM akan mendapatkan tambahan penghasilan.
2. Bagi pendamping PKH, hendaknya selalu memberikan motivasi dan arahan agar KPM lebih mandiri dan memiliki kesadaran untuk memperbaiki ekonomi mereka dengan aktif di KUBE dan mulai berwirausaha. Sehingga tidak selamanya mereka bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah,

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Arif, M. Nurianto Al dan Euis Amalia. 2016. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional.* Jakarta: Kencana.

Asy'ari, Musa. 1992. *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Klaten: Lesfi Institusi Logam.

Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomi Otonomi Daerah.*Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Bahri, Efri Syamsul. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*. Kediri: FAM Publishing.

Bahri, Efri Syamsul. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan.* Kediri: FAM Publishing.

Bashith, Abdul. 2012. *Ekonomi Kemasyarakatan.* Malang: UIN-Maliki Press.

Basrowi dan Siti Juariyah. 2010. "Analisi Kondisi Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Manggarai, Kabupaten Lampung Timur", *dalam Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol. 7 Nomor 1*.

Cholitin, Erna Erawati dan Juni Thamrin. 1997. *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*. Bandung: Yayasan Akita.

Damsar dan Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Ekonomi Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif.* Bandung: Pustaka Setia.

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. 2018. *Petunjuk Teknis Program Keluarga Harapan.*

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. 2019. *Pedoman Pelaksanaan PKH*.

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Kesehatan.n.d.*

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. 2013. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*.

IAIN PURWOKERTO

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. 2012. *Buku Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan*.

Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Husaini Usman, Purnomo Setiady. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.

Karim, Adiwarman A. 2015. *Ekonomi Mikro Islam.* Jakarta: Rajawali Pers.

Kartiawati. 2017. "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)", *Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.*

Kholif, Khodiziah Isnaini, Irwan Noor dan Siswidiyanto. 2014. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto", *Malang: Universitas Brawijaya.*

Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin E. Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Mubyarto. 1996. *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*. Yogyakarta: Adtya Media.

Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi.* Yogyakarta: BPFE.

Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Purwana, Eko Agung. 2014. "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam", *dalam jurnal Justitia Islamica, Vol. 11 No. 1.*

Rahardjo, M. Dawan. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.

Rosni. 2012. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", *Jurnal Geografi.*

Sahib, Munawwarah. 2016. "Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa", *Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin.*

Sodiq, Amirus. 2015. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *dalam jurnal Equilibrium, Vol. 3 No. 2.*

Sudarsono, Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekosiana.

Sudjangi. 1997. *Model Pendekatan Agama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kotamadya.* Jakarta: Badan Litbang Agama, Depagri.

IAIN PURWOKERTO

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2016.

Suklistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaga Media.

Sumadiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suryabrata. 2010. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Rajawali Pers.

Syahza, Almasdi. 2004. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau", *dalam Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 6, No.3.*

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis.* Yogyakarta: Teras.

Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis.* Jakarta: Bumi Aksara.

TNP2K. 2017. *Panduan Umum Program Keluarga Harapan Meraih Keluarga Sejahtera*. Jakarta: Kementrian Sosial RI.

Virgoreta, Dyah Ayu, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo. 2015. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan jenu, Kabupaten Tuban)",*Malang: Universitas Brawijaya.*

www.beritasatu.com. Diakses pada tanggal 9 Juli 2020, pukul 11.30 WIB.

www.dpr.go.id. Diakses pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 11.23 WIB.

www.kemensos.go,id/program-keluarga-harapan, diakses pada tanggal 9 September 2018 pukul 09.45 WIB.

www.pkh..kemsos.go.id. Diakses pada tanggal 10 November 2019 pukul 14.42 WIB.

Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana.

Zamzami, Lucky. 2011. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Nagari Ampiang Perak, Sumatra Barat", *dalam Jurnal MIMBAR, Vol. XXVII, No.1.*